

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan luar negeri suatu negara mencerminkan situasi politik dalam negerinya dan dipengaruhi oleh perubahan dinamis dalam lingkungan regional dan internasional. Hal ini terlihat dari penerapan politik luar negeri Amerika Serikat (AS) dalam hubungannya dengan dunia untuk mewujudkan kepentingan nasional AS.¹ Kebijakan luar negeri AS selalu bersifat dinamis, bergantung pada kebijakan yang disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya. Aktor yang menentukan kebijakan luar negeri AS termasuk Kongres dan presiden, tetapi juga lembaga pendukung yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri seperti CIA, Departemen Luar Negeri yang ditugaskan, Kementerian Pertahanan Nasional dan kekuatan militer. Kebijakan luar negeri AS pada awal abad ke-21 dinilai cenderung lebih memperkuat peran hegemonik AS di dunia dibandingkan sebelumnya.

Kebijakan luar negeri AS baru ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan supremasi AS di segala bidang dengan segala cara, apa yang mereka inginkan adalah dunia unipolar di mana AS “menerapkan peraturan namun, demi kebaikannya, tidak harus terikat oleh peraturan tersebut” dan dapat

¹Reni, Windiani. Indonesia: Politik Luar Negeri dan Globalisasi. Jurnal Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 2, 2010, berjudul "Politika". Artikel ini dapat ditemukan di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4894/4438>.

bertindak secara sepihak, jika tindakan sepihak tersebut memungkinkan melayani kepentingan AS.²

AS memiliki pengaruh ekonomi, politik, dan militer yang sangat besar di seluruh dunia. Untuk saat ini AS, merupakan bagian yang sangat diperlukan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).³ AS memiliki kekuatan ekonomi dan militer di dunia, AS juga memberikan kontribusi keuangan terbesar bagi PBB dan memiliki suara yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan PBB dan alokasi sumber daya. AS mempunyai komitmen politik yang kuat terhadap PBB walaupun ada perbedaan pendapat AS mendukung peran PBB dalam menjaga perdamaian, mengatasi konflik, dan mempromosikan Pembangunan berkelanjutan.

AS dan PBB sulit dipisahkan karena hubungannya yang erat antara keduanya dan peran penting AS dalam organisasi tersebut. AS adalah anggota penting yang memberikan kontribusi besar dalam anggaran, memiliki pengaruh politik yang besar, dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan global melalui organisasi tersebut. Keterkaitan ini menciptakan hubungan yang kuat dan saling mendukung antara AS dan PBB dalam menangani masalah masalah dunia.⁴

Data resmi PBB menunjukkan bahwa AS menanggung sebagian besar biaya operasional organisasi tersebut, membiayai berbagai program dan organisasi,

² Nur, Yuliantoro, 2005. "Hegemoni Amerika Pasca 11 September: Menuju Sebuah "Imperium Amerika Baru", yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 9, No. 1, hlm. 91–112. Akademi Gadjah Mada. Juli 2005

³ John M. Scheb, John M. Scheb II (2002). An Overview of the American Court System. Delmar, Florence, KY, p. 6.

⁴ Amerika Serikat <https://unausa.org/advocacy/the-united-states-and-the-un/>

seperti program kemanusiaan, misi perdamaian, dan organisasi-organisasi PBB lainnya. AS pada tahun 2021 muncul sebagai donatur utama dan pembela kesehatan dan hak-hak perempuan. AS dan organisasi kependudukan PBB di *United Nations Population Fund* (UNFPA) mempunyai banyak tujuan yang sama dan berpusat pada peningkatan kesehatan, mata pencaharian dan nama baik perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. AS telah memulihkan pendanaan bersama sejumlah 50,5 miliar USD pada tahun 2022 untuk pergerakan pembelaan Kesehatan hak-hak perempuan. AS juga merupakan kontributor terbesar respon kemanusiaan pada tahun 2022, dengan menyediakan lebih dari 131 million USD dalam upaya penyelamatan nyawa.⁵

Sebagai anggota tetap, AS memiliki hak veto yang memungkinkannya untuk memblokir setiap resolusi Dewan Keamanan yang diusulkan, termasuk resolusi-resolusi terkait dengan sanksi internasional, intervensi militer, dan tindakan lainnya. Hak ini memberikan AS kekuatan besar dalam mempengaruhi keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Salah satu alasan utamanya adalah untuk mencegah negara lain menjadi korban keganasan lagi dan untuk sejak saat itu menempatkan hubungan internasional di atas dasar hukum, bukan kekuatan.⁶

Pada awalnya, Salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki hak veto. (DK PBB), dan dibahas secara luas dan rutin selama penyusunan Piagam PBB di Dumbarton Oaks, Yalta, dan San Francisco. Kelima negara ini akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan Perang Dunia II.⁷ Hak

⁵ UNFPA, <https://www.unfpa.org/donor/united-states-america>, 2022.

⁶ Hata, "Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Perang Dingin", yang diterbitkan di Malang oleh Setara Press pada tahun 2012, hlm. 5.

⁷ Suwardi Sri Setianingsih, Pengantar Hukum Organisasi Internasional . Cetakan 1 Universitas Indonesia, Jakarta. 2004. Hal. 291.

veto merupakan hak khusus yang diberikan kepada lima negara anggota tetap Dewan Keamanan (Inggris, AS, Rusia, Perancis, Tiongkok) yang terdiri dari negara big power. Secara umum, kelima negara ini mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibandingkan negara anggota lainnya.⁸ Hal ini ditakutkan akan menimbulkan ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kelima negara tersebut merupakan lima negara terkuat dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menjaga stabilitas di tingkat global. Pada pasal 2 ayat 1 piagam PBB, asas kesetaraan negara ditetapkan, dan pemberian hak veto pada dasarnya menyimpang dari asas tersebut.⁹

AS telah menggunakan hak vetonya sebanyak 90 kali sampai saat ini, pertama kali AS menggunakan hak vetonya pada 17 Maret 1970, veto yang digunakan untuk menghentikan resolusi yang mengancam Inggris karena tidak berhasil memerangi rezim minoritas kulit putih di Rhodesia Selatan. AS telah menggunakan hak vetonya sebanyak 49 untuk melindungi Israel terkait konflik Israel-Palestina.¹⁰ Pada tahun 2021, saat konflik antara Israel dan Hamas memanas di Gaza, AS memveto beberapa resolusi menyuarakan penghentian kekerasan dan gencatan senjata. Pemerintah AS menyatakan bahwa resolusi tersebut tidak cukup menekankan hak israel untuk menghindari serangan dari Hamas, yang AS anggap sebagai kelompok teroris. Meskipun sebagian besarnya negara anggota Dewan Keamanan mendukung resolusi tersebut, AS tetap pada

⁸ Adventura, Battista Pridana, "Hak Veto Dewan Keamanan PBB dan Asas Kesamaan Negara Dalam Era Globalisasi", *Justitia et Pax*, 37.2, hlm. 177–96, doi:10.24002/jep.v37i2.3849. 2021.

⁹ Nasif, *Hukum Organisasi Internasional* (Fakultas Hukum Padang), h. 64.

¹⁰ MiddleEastEye, *The 49 times the US used veto powers against UN resolutions*, 20 November 2024.

posisinya, mengklaim bahwa gencatan senjata segera tanpa mengatasi ancaman Hamas hanya akan memperpanjang konflik.¹¹

Pada tahun 2023, situasi serupa kembali terjadi setelah Hamas melakukan serangan besar terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, AS memveto resolusi yang diajukan oleh Brasil yang meminta penghentian sementara kekerasan untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Alasan utama AS menolak resolusi ini adalah karena tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap hak Israel untuk membela diri dari serangan Hamas.¹²

Tentunya hal ini bertolak belakang dengan tujuan AS dan peran yang diambilnya dalam dunia internasional sebagai pencipta kedamaian dunia. Dampak yang dikeluarkan dari keputusan veto tadi menunjukkan peningkatan kekerasan dan kerugian besar di pihak Palestina. Keputusan AS untuk mendukung Israel sebagai upaya mencapai *national interest*-nya tentunya tidak hanya berdampak pada Palestina saja, namun juga pada hubungan Israel dengan AS serta kedudukan AS dalam PBB. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana bentuk kepentingan nasional AS dalam kebijakan luar negeri AS terhadap penggunaan hak veto di sidang DK PBB konflik Israel-Palestina.

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan luar negeri AS selalu bersifat dinamis, bergantung pada kebijakan yang disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya. Tujuan utama kebijakan AS untuk mempertahankan dan meningkatkan supremasi AS di segala

¹¹Eric Bazail-Eimil, *US vetoes Israel ceasefire resolution at the UN*, (2023)

¹²United Nations, *Israel-Gaza crisis : US vetoes Council Resolution*, (2023)

bidang. AS memiliki pengaruh ekonomi, politik, dan militer yang sangat besar di seluruh dunia. AS dan PBB sulit dipisahkan, belakangan AS mendukung peran PBB dalam menjaga perdamaian, mengatasi konflik, dan mempromosikan Pembangunan berkelanjutan. Hak veto merupakan hak khusus yang diberikan kepada lima negara anggota tetap Dewan Keamanan termasuk AS. Pada tahun 2021, saat konflik antara Israel dan Hamas memanas di Gaza, AS memveto beberapa resolusi menyuatkan penghentian kekerasan dan gencatan senjata. Pemerintah AS menyatakan bahwa resolusi tersebut tidak cukup menekankan hak Israel untuk mempertahankan diri dari serangan Hamas, yang dituduh AS sebagai kelompok teroris. Keputusan AS untuk mendukung Israel sebagai upaya mencapai *national interest*-nya tentunya tidak hanya berdampak pada Palestina saja, namun juga pada hubungan Israel dengan AS serta kedudukan AS dalam PBB. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti apakah kebijakan luar negeri AS dalam penggunaan hak veto di sidang DK PBB terkait konflik Israel-Palestina bagian dari kepentingan nasional. **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya yaitu bagaimana bentuk kepentingan nasional AS dalam kebijakan luar negeri AS terhadap penggunaan hak veto di sidang DK PBB konflik Israel-Palestina?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk kepentingan nasional AS dalam kebijakan luar negeri AS terhadap penggunaan hak veto di sidang DK PBB konflik Israel-Palestina

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan studi Hubungan Internasional dalam kajian kebijakan luar negeri dapat membantu dalam memahami bagaimana keanggotaan permanen Dewan Keamanan PBB, yang memiliki hak veto, seperti AS, dapat mempengaruhi keputusan dan dinamika sidang keamanan PBB. Hal ini memungkinkan kita untuk menganalisis seberapa efektif institusi tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan global.
2. Secara praktik penelitian ini dapat membantu memahami lebih dalam tentang dinamika politik Internasional, menganalisis kebijakan bagaimana hak veto mempengaruhi pengambilan keputusan di PBB dan bagaimana hal tersebut berdampak pada upaya penyelesaian konflik dan perdamaian, dan mendukung advokasi reformasi kebijakan PBB.

1.6 Studi Pustaka

Sebuah artikel yang berjudul "*How Foreign Policies Impact the International System: The Case of U.S., China, and Russia Veto Power*", ditulis oleh Ambrues Monboe Nebo Sr.¹³ Artikel ini mengkaji dampak kebijakan luar negeri AS, Rusia, dan Tiongkok terhadap sistem internasional. Kebijakan luar

¹³N.M. Ambrues, *How Foreign Policies Impact the International System: The Case of U.S., China, and Russia Veto Power*, University of Liberia, 7 Juli 2024.

negeri melampui negara dan berlaku dalam konteks internasional dan domestik. Di tingkat negara bagian atau nasional, interaksi antara negara-negara dipandu oleh kebijakan luar negeri masing-masing, yang relevan dengan kepentingan nasional mereka. Di tingkat internasional, perilaku politik antara negara juga dipengaruhi oleh perlindungan kepentingan nasional mereka, yang tidak dapat dipisahkan dari masing-masing kebijakan internasional. Di dalam PBB, negara-negara tidak hanya mempromosikan kepentingan nasional mereka tetapi juga mencari perlindungan. Karena kepentingan nasional memainkan peran penting dalam meningkatkan legitimasi negara dan kedaulatannya, setiap gangguan dalam sistem internasional kemungkinan akan mengakibatkan reaksi balik atau kemunduran.

Pada November 2022, Rusia dan China memveto resolusi DK PBB yang dirancang oleh AS yang bertujuan untuk memperkuat sanksi terhadap Korea Utara. Dalam contoh ini, sikap atau perilaku politik Rusia dan China didorong oleh kepentingan nasional masing-masing yang selaras dengan kebijakan luar negeri mereka. Kedua negara tersebut memulai strategi rudal balistik untuk melindungi kepentingan keamanan nasional mereka. Demikian pula, motif AS di balik rancangan resolusi tersebut didorong oleh kepentingan keamanan nasional dan kebijakan luar negerinya serta melindungi kedaulatannya dari ancaman yang dianggap berasal dari Korea Utara.

Dalam ranah hubungan internasional, negara-negara secara mencolok menggunakan berbagai instrumen atau alat untuk mengejar tujuan atau sasaran kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional mereka. Instrumen atau alat tersebut umumnya terbagi menjadi tiga kategori besar yaitu, ekonomi, dan militer.

Politik dan ekonomi termasuk dalam kategori diplomasi kekuatan lunak, sementara militer adalah diplomatik kekuatan keras. Selain instrumen atau alat yang telah disebutkan sebelumnya, konsep hak veto, yang termasuk dalam kategori kekuatan luna, adalah alat penting yang digunakan oleh lima negara tetap (P5) dalam sistem internasional untuk memajukan dan melindungi kebijakan luar negeri mereka yang krusial bagi kepentingan nasional mereka. Ini adalah satu-satunya alat yang tersedia bagi mereka untuk tujuan khusus ini. Dalam istilah yang lebih sederhana, kekuasaan veto memungkinkan negara-negara P5 untuk mempromosikan, melindungi, atau menjaga kepentingan nasional mereka. Rusia, khususnya telah menggunakan veto paling sering, dengan memblokir 155 resolusi sejak pembentukan DK. AS telah menggunakan hak veto-nya sebanyak 90 kali, yang terbaru pada Desember 2023 ketika veto terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata dalam perang yang sedang berlangsung antar Israel dan Hamas.

Referensi kedua yang penulis ambil adalah *“The Effects Of United Nations Security Council Veto Power On Stability Of States: A Case Study Of Syria and Its Neighbors”* yang ditulis oleh Tsekawe Retta Sebhathu.¹⁴ Artikel ini membahas dampak kekuatan UNSC veto dari tahun 2011 hingga 2019, terhadap stabilitas Suriah dan negara tetangganya. Artikel ini menjelaskan UNSC telah gagal melaksanakan mandatnya dan memulihkan stabilitas di suriah. Sementara para anggota tetap berjuang untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan politik mereka di negara itu, rakyat suriah telah menderita bencana perang sipil yang memaksa jutaan warga sipil melarikan diri dari rumah mereka dan merenggut lebih dari setengah juta nyawa Lebih dari lima juta orang meninggal karena

¹⁴ Sebhathu Retta T. (2020) *The Effects Of United Nations Security Council Veto Power On Stability Of States: A Case Study Of Syria and Its Neighbors*, *Afrika Studies Review*. Hal : 1 – 48.

melarikan diri dari rumah mereka. Penelitian itu menemukan bahwa anggota tetap gagal mengambil tindakan pencegahan krisis. Misalnya, dari oktober 2011 hingga desember 2019, Rusia dan Cina menolak 14 resolusi rancangan yang bertujuan untuk mengakhiri perang sipil dan menghentikan krisis kemanusiaan.

Akibatnya, perang sipil suriah yang berkepanjangan telah menyebabkan kerusakan ekonomi, politik, dan sosial di banyak negara, termasuk negara-negara tetangga seperti Turki, Yordania, Irak, dan Lebanon. tetapi juga bagi eropa dan amerika utara. Menerapkan resolusi yang berupaya menghentikan malapetaka akan meminimalkan dampak spillover. Dampak dari ketidaksepakatan hak veto terhadap perdamaian dan keamanan di Suriah sangat sulit untuk dipahami dengan mempertimbangkan kehancuran sosial dan ekonomi di negara tersebut .

Pertama, ketidaksepakatan tersebut secara efektif menghalangi Dewan Keamanan untuk mengeluarkan resolusi yang dapat memutuskan bagaimana melakukan intervensi di Suriah untuk menjaga stabilitas di seluruh negeri. Sekali lagi, anggota Dewan gagal memperkenalkan mekanisme alternatif untuk memecahkan kebuntuan. Masalahnya adalah hubungan antara perselisihan mengenai hak veto dan krisis di Suriah belum diteliti. Pemeriksaan tersebut bisa saja menunjukkan korelasi antara kegagalan Dewan Keamanan dalam melaksanakan mandatnya dan bencana kemanusiaan dan ekonomi di Suriah.

Namun demikian, masalah akhirnya menjadi jelas bahwa perselisihan antara hak veto telah berdampak pada jutaan nyawa di seluruh negeri. Dampak dari ketidaksepakatan hak veto dapat dipahami dengan jelas ketika kekuatan veto gagal mencapai titik temu mengenai masalah ini pada bulan April 2011 dan ketika

pasukan pemerintah meningkatkan tindakan kejam mereka dan membunuh ratusan warga sipil dalam waktu tiga bulan dari bulan Maret hingga Mei. Krisis ini dimulai pada bulan Februari 2011 dan meningkat pada bulan Maret tahun yang sama ketika lima belas anak memasang kritik terhadap pemerintah di dinding yang ditanggapi secara brutal oleh pemerintah Suriah. Dari tahun 2011 hingga 2019, lebih dari 500.000 warga sipil terbunuh. Sementara lebih dari 5 juta orang meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi di negara-negara tetangga seperti Turki dan Lebanon, lebih dari 6,3 juta warga sipil telah mengungsi ke suriah.

Referensi ketiga yaitu *A qualitative study on the impact geo-strategic interests of veto powers has on the UN decisions to intervene in Libya, and the Non-intervention in Syria* yang ditulis oleh M. Malik Mourtaday.¹⁵ Artikel ini menjelaskan tentang adanya korelasi negatif antara anggota tetap PBB kepentingan geo-strategis dan intervensi PBB, artikel ini bertujuan untuk mengkonstruksi teori, dengan menggali kemungkinan-kemungkinan yang ada jalur korelasi ini.

Penelitian sebelumnya tentang intervensi bersenjata PBB juga perlu dilakukan dalam konteks umum yang mempengaruhi perang saudara, hubungan ekonomi, dan militer aliansi merupakan jalur yang memungkinkan bagi pengaruh anggota “pemegang hak veto”. Selain itu, sebuah saran baru dibuat, bahwa keputusan PBB untuk melakukan intervensi dapat dipandang saat ini sebagai akibat dari kalkulus soft-balancing hak veto, yang hanya bergantung pada sejauh

¹⁵ M. Malik Mourtaday. (2016). *A qualitative study on the impact geo-strategic interests of veto powers has on the UN decisions to intervene in Libya, and the Non-intervention in Syria*. Europe Studies Review. Hal : 3-5.

mana potensi intervensi dapat mereformasi keseimbangan kekuatan di negara tersebut dunia internasional yang anarkis. Metode perbandingan terstruktur dan terfokus digunakan untuk menganalisis kasus Libya dan Suriah.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan pihak ketiga mengambil keputusan melakukan intervensi, seperti yang disarankan dalam literatur tentang manajemen konflik dan perang saudara. Untuk menjelaskan variasi dalam respon Dewan Keamanan PBB terhadap krisis kemanusiaan, makalah ini melihat dampak dari soft balance hak veto, yang sebagian besar bergantung pada besarnya risiko terhadap kepentingan geo-strategis negara-negara besar, dan potensi reformasi dalam keseimbangan kekuatan internasional. Lebih jauh lagi, analisis tersebut menyajikan perlindungan kepentingan ekonomi di negara sasaran sebagai salah satu dari banyak variabel yang dipertimbangkan saat membuat keputusan untuk melakukan intervensi dalam perang dalam negeri.

Meskipun tidak menyangkal peran dinamika lain yang memotivasi peluang dan penyakit anggota tetap PBB untuk melakukan intervensi dalam perang saudara di negara lain, penelitian ini berupaya untuk menempatkan hubungan perdagangan energi dalam konteks intervensi konflik sipil. Tidak adanya kepentingan pribadi dalam konflik atau peristiwa lobi pro-intervensi secara otomatis menghasilkan keputusan untuk melakukan intervensi. Sebaliknya, para pembuat kebijakan menganggap ketergantungan energi sebagai variabel penting dalam persamaan geo-strategis politik. Oleh karena itu, besarnya risiko terhadap keamanan energi nasional negara-negara besar meningkatkan kemungkinan pemerintah mengambil tindakan, dengan melibatkan intervensi bersenjata jika diperlukan.

Temuan empiris ini memberikan dukungan terhadap argumen utama bahwa hubungan dagang bekerja dengan cara yang mirip dengan koalisi militer strategis yang ada – dimana motivasi untuk melakukan intervensi atau tidak, sebagian besar bergantung pada kehati-hatian dalam kalkulus biaya-manfaat geostrategis, terkait energi nasional dan aliansi. keamanan, dan beberapa interaksi dengan norma-norma internasional. Makalah ini lebih lanjut berpendapat bahwa keterlibatan untuk mempertahankan hubungan ekonomi yang ada lebih mungkin terjadi ketika lokasi konflik dalam negeri signifikan secara geostrategis, dalam hal ekspor energi dan investasi infrastruktur. Selain itu, ada usulan baru yang menyatakan bahwa keputusan PBB untuk melakukan intervensi saat ini dapat dilihat sebagai akibat dari kalkulus soft-balancing kekuatan veto, yang hanya bergantung pada sejauh mana potensi intervensi dapat mereformasi keseimbangan kekuatan di dunia internasional yang anarkis. Oleh karena itu, kontribusi utama penelitian ini menggarisbawahi peran ikatan energi dalam prediksi negara mana yang diperkirakan akan ikut campur dalam konflik domestik negara lain.

Keempat, peneliti menggunakan sebuah artikel jurnal yang berjudul “*The Effect of the United States’ and Russia’s Veto Power on the UN Security Council’s Ability to Protect Human Rights*” yang ditulis oleh Dr. Marcia Denny.¹⁶ Artikel ini mengkaji apakah penggunaan hak veto yang dilakukan AS dan Rusia belakangan ini telah menghambat atau membatasi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dalam menjalankan fungsi yang diamanatkannya. Secara khusus, artikel ini berfokus pada apakah tindakan veto yang dilakukan mereka yang tetap menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, pada kenyataannya telah menyebabkan

¹⁶ Dr. Marcia Denny. *The Effect of the United States’ and Russia’s Veto Power on the UN Security Council’s Ability to Protect Human Rights*. - Issue No.(3) Part (1) May 2018. Hal : 141-174.

berlanjutnya, atau bahkan memperburuk, pelanggaran hak asasi manusia atau krisis kemanusiaan di Suriah dan Wilayah Pendudukan Palestina.

Para pemimpin PBB, termasuk Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Pangeran Zeid Ra'ad Al Hussein dari Yordania, telah menekankan bahwa pelaksanaan dan penegakan jaminan hak asasi manusia sangat penting untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional. Mereka mengakui bahwa perlindungan hak asasi manusia harus diperoleh melalui tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Jika Dewan tidak mampu atau tidak mau bertindak dalam menghadapi kekejaman massal akibat penggunaan hak veto dari lima anggota tetap, maka Dewan sendirilah yang menjadi aktor dalam kelanjutan kekejaman tersebut.

Artikel ini mengulas secara singkat mandat perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam PBB, termasuk ringkasan singkat tentang kewajiban badan-badan Piagam tersebut dalam hal ini. Fokus utamanya adalah pada kewajiban Dewan Keamanan PBB untuk menjamin dan memelihara perdamaian internasional dan apakah hal ini mencakup kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia atau tidak. Dengan mengingat hal tersebut, maka dilakukan analisis terhadap cara anggota tetap Dewan Keamanan PBB menggunakan hak vetonya. Pemeriksaan mengenai alasan mereka menggunakan hak veto dan apa akibat yang dilakukan, khususnya terhadap Rusia.

Secara khusus, artikel ini mengkaji apakah penggunaan hak veto oleh Rusia dalam krisis Suriah dan AS dalam situasi yang berkelanjutan di Palestina telah

menghambat atau membatasi Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan fungsi ini. Selain itu, solusi terhadap dilema hak veto ini, yang baru-baru ini dikemukakan oleh para ahli, akan dianalisis secara singkat termasuk – (1) penerapan kembali aturan abstain wajib dalam Piagam PBB Pasal 27, paragraf 3; (2) abstain veto secara sukarela sebagai kewajiban P5 dalam situasi yang melibatkan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia skala besar yang dikoordinasikan dengan tanggung jawab untuk melindungi; dan (3) penggunaan kembali Resolusi Persatuan untuk Perdamaian Majelis Umum PBB No. 377A tanggal 3 November 1950.

Kelima peneliti menggunakan sebuah artike jurnal yang berjudul “Indonesian Attitude in Conflict Resolution Moving the Capital of Israel Adettia Gama menulis *From Tel Aviv to Jerusalem AT the UN (2014–2019)*. Presiden AS Donald Trump mengumumkan relokasi Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017. Sistem internasional melihat proklamasi Presiden Trump sebagai upaya untuk mempercepat perdamaian antara Palestina dan Israel. Pengumuman ini dianggap sebagai permulaan dari cara baru untuk menyelesaikan konflik kedua negara.¹⁷

Agenda ini telah ada sejak tahun 1995, ketika Undang-Undang Perwakilan Jerusalem disahkan oleh Kongres Amerika Serikat ke-104. RUU ini meminta pemerintah federal memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada tanggal 5 Juni 2017, Senat

¹⁷ Adettia Gama. *Indonesian Attitude in Conflict Resolution Moving the Capital of Israel From Tel Aviv to Jerusalem AT the UN*. Padjadjaran University. Vol. 6 No 1 June 2023.

mengesahkan langkah ini. Keputusan pemerintah AS untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Israel telah memicu protes dari berbagai pihak gender di seluruh dunia, yang beberapa di antaranya berpotensi mengakibatkan kekerasan, terutama terhadap warga AS.¹⁸

Untuk menangani masalah ini, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang pada 18 Desember 2017 dan menyetujui resolusi yang menentang sikap unilateral Amerika Serikat terhadap pengakuan Yerusalem sebagai bagian dari penyelesaian konflik yang sedang berlangsung. *"Any decisions and actions which purport to have altered the character, status, or demographic composition of the Holy City of Jerusalem have no legal effect, are null and void, and must be rescinded in compliance with relevant resolutions of the Security Council, and in this regard calls upon all States to refrain from the establishment of diplomatic missions in the Holy City of Jerusalem (Security Council Resolution 478 (1980)).* Dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, 14 menyetujui resolusi tersebut dan satu menolak.

Amerika Serikat, sebagai anggota, tetap memberikan tanggapan negatif dan mengeluarkan veto. Walaupun mendapatkan dukungan dari empat anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, rancangan resolusi tersebut secara otomatis ditolak. Untuk mengatasi masalah ini, Turki dan Yaman, sebagai perwakilan OKI dan Liga Arab, meminta Majelis Umum PBB mengadakan Sidang Umum PBB di New York pada 21 Desember 2017 untuk

¹⁸ Olinzena. Security Message for U.S. Citizens: President Trump's Announcement that the United States Recognizes Jerusalem as the Capital. Abuja: U.S Embassy & Consulate in Nigeria. Diakses dari <https://ng.usembassy.gov/securitymessage-u-s-citizens-presidenttrumps-announcement-unitedstates-recognizes-jerusalem-capital/>. 2017.

melibatkan semua anggota. Sikap ini merupakan respon terhadap kegagalan dari Dewan Keamanan PBB dalam pengambilan keputusan mengenai status Yerusalem.¹⁹

Prosedur yang diminta oleh perwakilan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab berdasarkan resolusi tertulis PBB yang meminta untuk diadakannya “Emergency Special Sessions”. Untuk mempertimbangkan masalah yang telah terjadi, sesi khusus ini berguna untuk membahasnya. Tujuannya adalah untuk membuat saran yang tepat dan dapat diandalkan untuk seluruh anggota untuk mendukung tindakan kolektif. Ini terjadi jika Dewan Keamanan tidak bertindak atau jika ada suara yang tidak bulat di antara anggota tetapnya.

1.7 Kerangka Konseptual

Penggunaan teori atau konsep sangat penting untuk membantu penelitian menganalisis permasalahan yang diangkat dan menjawab pertanyaan penelitian dalam suatu penelitian. Untuk menjawab pertanyaan masalah ini, peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional Shaohua Hu.

1.7.1 National Interest

Dalam memahami peran negara sebagai aktor internasional, sangat penting untuk mempertimbangkan kepentingan nasional negara. Suatu negara bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan tindakan yang diambilnya. Kepentingan nasional harus dipertimbangkan saat membuat strategi kebijakan

¹⁹ U.N. News (2017). *Middle East: Jerusalem Resolution Not Adopted by Security Council*. United Nations, New York. From <https://news.un.org/en/story/2017/12/639772-middle-east-securitycouncil-fails-adopt-resolutionjerusalem>

yang efektif untuk mencapai tujuan dan target negara.²⁰ Alasan peneliti memilih konsep ini membantu menjelaskan kebijakan luar negeri AS dalam penggunaan hak veto di sidang DK PBB terkait konflik Israel-Palestina bagian dari kepentingan nasional. Konsep ini juga mengeksplorasi tentang kebijakan luar negeri AS diepngaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, militer, dan aliansi strategis.

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional berarti kekuasaan, dan negarawan harus bertindak dan berpikir sesuai dengan itu. Kepentingan nasional mengacu pada prinsip atau prinsip yang dianut oleh suatu negara. Di sini, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan diinginkan oleh beberapa orang atau kelompok orang. Akibatnya, nilai-nilai atau cita-cita tersebut harus menjadi nilai-nilai yang diinginkan dan dapat diterima oleh orang-orang di mana pun mereka berada. Nilai-nilai material, normatif, dan politik termasuk dalam kategori ini.²¹

Istilah dari kepentingan nasional adalah "nasional" berarti "sosial" untuk sebuah negara bangsa, dan "nasional" tidak berarti sub- atau supra-nasional, dan "minat" berarti keuntungan, baik material maupun non-material. Jika maksud dari istilah itu sederhana dan mudah dipahami, ekstensinya mengandung banyak elemen. Kebanyakan orang akan setuju bahwa keamanan nasional, keuntungan ekonomi, kekuatan budaya, dan status internasional sangat penting.²²

Pada penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan luar negeri bagi suatu negara. Mengidentifikasi berbagai perspektif kebijakan luar negeri itu

²⁰ Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta, 2008)

²¹ Ejitu N. Ota and Chinyere S. Ecoma, "Power and National Interest in International Relations", *European Journal of Humanities and Social Sciences*, vol. 2, (July: 2022): 27.

²² Shaohua Hu (2016): A framework for analysis of national interest: United States policy toward Taiwan, *Contemporary Security Policy*, page 3.

mudah; namun, membuktikan perspektif mana yang paling bermanfaat bagi kepentingan nasional tidak semudah itu, karena setiap perspektif memiliki kelebihan dan kekurangan. Para aktor dan preferensi mereka memengaruhi kebijakan internasional, tetapi tidak ada negara yang dapat mengubah kebijakan sesuai keinginan mereka. Kekuatan nasional seringkali berkontribusi pada kepentingan nasional. Negara-negara yang lebih lemah mungkin bahkan tidak melawan invasi asing, tetapi negara-negara yang lebih kuat mungkin menggunakan kekuatan yang berlebihan untuk masalah kecil. Oleh karena itu, kekuatan nasional harus dibandingkan dengan kepentingan nasional. Adapun tiga bentuk kepentingan nasional menurut Shaohua Hu yaitu *Primary Interest* (kepentingan primer) kepentingan yang mengacu pada kepentingan masyarakat yang vital di mana bangsa tersebut bersedia untuk berjuang dan mati. Selanjutnya ada *Secondary Interest* (kepentingan sekunder) kepentingan yang menyangkut pembangunan bangsa secara keseluruhan, tetapi tidak begitu penting sehingga memerlukan penggunaan kekuatan. Kepentingan terakhir yaitu *Tertiary Interest* (kepentingan tersier) kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, tetapi hanya mempengaruhi sejumlah kecil orang secara besar-besaran atau sejumlah besar orang secara kecil-kecilan.

Kepentingan nasional menurut Shaohua Hu adalah 'nasional' yaitu masyarakat untuk sebuah negara, '*Interest*' berarti keuntungan dan manfaat, baik itu material maupun non-material. Jika intensi dari istilah ini sederhana dan jelas, perluasannya mengandung komponen-komponen yang berbeda. Sebagian besar orang akan setuju bahwa keamanan nasional, keuntungan ekonomi, status internasional, dan pengaruh budaya merupakan hal yang menonjol. Peneliti

memilih konsep ini karena konsep ini relevan untuk studi kasus veto AS tentang masalah Israel-Palestina karena mencakup beberapa elemen kepentingan nasional yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Dalam definisi dan komponen-komponen kepentingan nasional tidaklah cukup untuk menentukan apakah suatu kebijakan tertentu merupakan kepentingan nasional atau tidak. Dalam pembuatan kebijakan dan analisis, Shaohua Hu membuat beberapa indikator. Adapun indikatornya yaitu, *Players* (Aktor), *Preferences* (Preferensi), *Prospect* (Prospek), dan *Power* (Kekuatan) yang dimiliki.

1. *Players* (Aktor)

Kebijakan luar negeri sering kali dibentuk dan terkadang ditentukan oleh faktor-faktor objektif, tetapi selalu dibuat oleh para aktor yang subjektif. Siapapun yang membuat kebijakan luar negeri bervariasi menurut negara dan waktu. Di AS, lingkungan antar negara yang aman dan sistem demokrasisnya memaastikan partisipasi banyak aktor. Kebijakan luar negeri terutama merupakan urusan pemerintah pusat. Berkat sistem cek dan keseimbangan AS, cabang yudikatif telah meninggalkan jejaknya sendiri. Namun, cabang legislatif dan eksekutif terutama berbagi kekuasaan. Kekuasaan Kongres telah berubah seiring berjalannya waktu. Kongres hampir sama dengan cabang eksekutif pada awalnya, itu dominan setelah Perang Saudara antara dua Perang Dunia, tetapi setelah Perang Dingin dimulai, Kongres tunduk pada Presiden. Di tengah Perang Vietnam dan skandal Watergate, Kongres yang bangkit menantangani kepresidenan imperialis. Namun, ia telah dibatasi oleh

pertenggaran antar partai, organisasi, dan regional. Kongres hanya sekali mengesampingkan veto yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri sejak tahun 1973.²³

Satu-satunya aktor terpenting dalam kebijakan luar negeri adalah Presiden. Fred Greenstein menggunakan dua kasus untuk membuktikan pendapatnya. Presiden Eisenhower memutuskan untuk tidak melakukan serangan udara di Vietnam pada tahun 1954, dan Presiden Johnson memilih untuk meningkatkan konflik di sana pada tahun 1965. Dalam kedua kasus tersebut, Wakil Presiden Nixon dan Humphrey memiliki pandangan yang berbeda. Mengenai Taiwan, Presiden Truman melakukan tidak meminta persetujuan Kongres sebelum mengirim Armada Ketujuh untuk melindungi Taiwan pada tahun 1950. Presiden mungkin tidak dengan sengaja mengabaikan atau merugikan kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri, tetapi kepentingan pribadi dan partisan mereka diperhitungkan. Norton Long berpendapat bahwa selain patriotisme, tujuan pertama seorang administrator adalah pencapaian dan pemeliharaan kekuasaan, yang merupakan prasyarat untuk pencapaian semua tujuan lainnya. Penilaian kepentingan nasional melibatkan interaksi antara faktor objektif dan pemain subjektif, serta mencerminkan konflik, kompetisi, dan kerja sama antara berbagai aktor.²⁴

2. *Preferences* (Preferensi)

²³ Shaohua Hu (2016): A framework for analysis of national interest: United States policy toward Taiwan, Contemporary Security Policy, page 6

²⁴ Shaohua Hu (2016): A framework for analysis of national interest: United States policy toward Taiwan, Contemporary Security Policy, page 8

Preferensi dalam keamanan nasional AS setelah berakhirnya Perang Dingin Hans Morgenthau mencatat bahwa kelangsungan hidup nasional digunakan untuk membenarkan semua jenis tujuan, termasuk pertahanan Taiwan dalam Perang Dingin. Pada masa sekarang, kontrol Cina dan Taiwan sendiri tidak akan mengganggu keseimbangan kekuatan antara AS dan Cina. Bagi Robert Ross, pemutusan aliansi dengan Taipei hampir tidak mengganggu keamanan AS, karena kehadiran angkatan laut AS di wilayah tersebut sudah cukup untuk menguasai perairan pesisir Cina. Dengan demikian, menjaga Taiwan tetap terpisah dari Cina merupakan kepentingan keamanan AS.²⁵

Preferensi dengan manfaat ekonomi kontrol Cina atas Taiwan mungkin akan berdampak terbatas pada ekonomi AS. Pulau ini miskin sumber daya alam, meskipun memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan AS setelah Perang Dunia II, kepentingan relatifnya bagi AS telah menurun. Pada tahun 1989, Taiwan merupakan mitra dagang terbesar ke-6, tetapi pada tahun 2013, Taiwan berada di urutan ke-12. Selain itu, perdagangan dan investasi antara AS dan Taiwan tidak dapat terpengaruh atau terganggu. Taiwan adalah produsen utama dalam teknologi informasi, tetapi tingkatnya tidak begitu maju untuk meningkatkan daya saing Tiongkok secara signifikan, yang jelas akan dirugikan adalah produsen senjata AS, karena Taiwan telah membeli terbesar kedua atau ketiga di dunia sejak akhir tahun 1980-an. Jadi,

²⁵ Shaohua Hu (2016): A framework for analysis of national interest: United States policy toward Taiwan, *Contemporary Security Policy*, page 8

kendali Cina atas Taiwan dapat membantu perekonomian Cina dan mempengaruhi perekonomian AS, namun dengan cara yang terbatas.²⁶

Preferensi terakhir adalah meningkatkan pengaruh budaya, yang membedakan AS adalah bahwa, yang didirikan berdasarkan serangkaian ide dan cita-cita, negara yang luar biasa ini telah aktif dalam menyebarkan pengaruh budaya. Dalam pandangan Huntington, kepentingan nasional berdasar dari identitas nasional, dan tidak seperti kebanyakan negara, ideologi penting bagi identitas AS. Dukungan AS terhadap penentuan nasib sendiri adalah bagian dari warisan anti-kolonialnya, dan orang AS sangat menghargai demokrasi bahkan Kissinger menyatakan bahwa setiap konsep kepentingan nasional harus mengalir dari tradisi demokratis negara tersebut dan kepedulian terhadap vitalitas demokrasi di seluruh dunia.

Untuk menentukan apakah suatu kebijakan bermanfaat bagi negara, harus dilihat apakah itu sesuai dengan keamanan negara, keuntungan ekonomi, status internasional, dan dampak budaya. Namun, ada dua alasan utama mengapa hal ini lebih sulit untuk dikatakan daripada dilakukan. Setiap preferensi memiliki kerugian dan keuntungan. Misalnya, mempertahankan Taiwan dapat baik untuk keamanan Amerika Serikat maupun buruk untuknya. Sama pentingnya, preferensi yang berbeda dapat membawa ke arah yang berbeda. Meskipun menjalin persahabatan dengan China dari perspektif ekonomi

²⁶ Shaohua Hu (2016): A framework for analysis of national interest: United States policy toward Taiwan, *Contemporary Security Policy*, page 9.

masuk akal, dari perspektif ideologis, melindungi Taiwan adalah tindakan yang tepat.

3. *Prospect* (Prospek)

Jika preferensi terlalu umum untuk memandu kebijakan luar negeri, mengidentifikasi berbagai hasil akan menyederhanakan penilaian kepentingan nasional. Tidak ada penentu yang lebih baik apakah kebijakan luar negeri berada dalam kepentingan nasional selain akhir hasilnya. Ketika berbicara tentang hubungan lintas selat, ada tiga prospek, yang pertama adalah reunifikasi Taiwan dengan China, yang mungkin terjadi karena berbagai alasan. Secara geografis, pulau tersebut kecil dan jauh lebih dekat dengan China dibandingkan dengan negara lain mana pun. Juga ada hubungan sejarah, budaya, dan linguistik yang kuat antara kedua belah pihak. Era pasca-Perang Dingin telah menyaksikan peningkatan integrasi sosial-ekonomi, sehingga permusuhan dan konflik lintas selat tidak menjadi tidak masuk akal.

Prospek kedua adalah kemerdekaan Taiwan. Semakin banyak orang Taiwan yang menganut tujuan ini untuk alasan yang dapat dimengerti. Faktor geografis dan sejarah memberi Taiwan identitas yang unit. Dinasti Qing adalah pemerintahan Tiongkok pertama yang memerintah pulau ini, dan hubungan lintas selat yang terputus dan renggang pada dasarnya terputus oleh pemerintahan Jepang selama 50 tahun. Setelah 1949, Taiwan dan Tiongkok telah mengambil jalan yang berbeda.

Prospek terakhir adalah pemeliharaan status quo yang berkisar dari permusuhan timbal balik selama Perang Dingin hingga integrasi yang meningkat setelahnya. Mempertahankan status quo adalah kebijakan AS yang sudah berlangsung lama. Dalam pandangan Stephen Krasner, metode logis-deduktif dalam mempelajari kepentingan nasional tidak bekerja dengan baik untuk sebuah hegemoni, yang integritas politik dan teritorialnya aman, atau untuk bidang-bidang isu yang tidak secara langsung terkait dengan tujuan inti. Sebaliknya, metode empiris-induktif dapat digunakan untuk menginduksi kepentingan nasional dari kata-kata dan perbuatan para pemimpin besar.

4. *Power* (Kekuatan)

Kepentingan nasional harus diukur terhadap kekuatan nasional. Dalam Perang Opium, Inggris jauh lebih tertarik pada China dibandingkan dengan Amerika Serikat, karena Inggris jauh lebih kuat daripada Amerika Serikat. Di zaman kita, sebaliknya yang benar, karena alasan yang sama.

Namun demikian, kekuasaan sulit untuk dihitung dengan mudah. Morgenthau berhasil dalam menjelaskan elemen-elemen kekuasaan, termasuk geografi, sumber daya alam, kapasitas industri, kesiapan militer, populasi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, masalah dalam mengevaluasi kekuasaan nasional: memperlakukan kekuasaan dalam istilah absolut, bukan dan kualitas pemerintahan. Dia bahkan memperingatkan tentang tiga pro utama dalam hal relatif;

melihat kekuasaan sebagai permanen, bukan berkembang; fokus pada satu faktor, tetapi tidak pada yang lain.²⁷ Dalam konflik lintas selat, Shaohua Hu membagi kekuatan AS ke dalam tiga kategori berdasarkan urutan perubahannya yaitu, geografi dan populasi, kekuatan ekonomi dan militer, serta keinginan rakyat dan aliansi internasional

Dalam konsep diatas dapat digunakan peneliti untuk mengkaji secara terstruktur dasar-dasar kebijakan veto AS terkait masalah Israel-Palestina. Dengan menggunakan konsep ini, penelitian dapat menyelidiki apakah kebijakan luar negeri AS dalam penggunaan hak veto di sidang DK PBB terkait konflik Israel-Palestina bagian dari kepentingan nasional.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang berusaha untuk mengkonstruksi realitas dan menekankan kedalaman makna atau data daripada perluasan data. Selain itu, metode kualitatif menggunakan bahasa penelitian yang bersifat deskriptif formal dan objektif melalui angka atau data statistik.²⁸ Cara memperoleh data dari penggunaan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan pidato-pidato yang disampaikan oleh tokoh-tokoh penting dalam penelitian ini yang membahas

²⁷ Shaohua Hu (2016): A framework for analysis of national interest: United States policy toward Taiwan, *Contemporary Security Policy*, page 14

²⁸ Merriam di dalam Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", *Makara, Sosial Humaniora, Universitas Indonesia* 9, No. 2, (2005): 57-65

tentang kepentingan nasional AS melalui kebijakan veto dalam sidang keamanan PBB studi kasus Israel-Palestina.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis dampak kebijakan veto AS dalam sidang keamanan PBB studi kasus Israel-Palestina. Untuk mendapatkan analisis yang lebih terukur maka batas penelitian ini dibahas pada rentang tahun 2017 hingga tahun 2023. Rentang tahun tersebut dipilih karena AS mengeluarkan hak vetonya dalam sidang keamanan PBB pada konflik Israel-Palestina. Selama konflik ini berlangsung, kedua negara belum menemukan solusi yang jelas. Selama waktu ini, banyak peristiwa telah terjadi yang berdampak pada kedua negara dan dunia secara keseluruhan.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis sendiri merupakan objek yang diteliti dan dibahas dalam penelitian kedepannya atau bisa disebut sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini unit analisis yang akan digunakan adalah “kebijakan veto AS dalam konflik Israel-Palestina” sedangkan unit eskplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan atau disebut juga sebagai variabel independen, unit eskplanasi yang akan diteliti adalah adalah “kepentingan nasional AS”. Penelitian ini menggunakan tingkat analisis yang menggunakan dan mengambil dari Russett dan Star yang membagi level atau tingkat analisis menjadi tiga yaitu : level individu, masyarakat (*Society*) ,

hubungan internasional, dan sistem dunia atau (*world system*).²⁹ Adapun tingkat analisis yang dipilih oleh peneliti sistem dunia (*world system*). Hal ini karena peneliti melihat bahwa penelitian ini melibatkan 3 negara dimana salah satunya adalah negara yang berasal dari kawasan yang berbeda dan berusaha memainkan peran dalam hubungan diplomatik dari beberapa negara di kawasan lain.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini lebih banyak menggunakan literatur bacaan dan sumber data sekunder. Data yang didapat berasal dari artikel jurnal Internasional, artikel jurnal nasional, serta sumber bacaan lainnya. Selain menggunakan buku dan artikel jurnal Internasional, peneliti juga menggunakan website yang dianggap peneliti cukup terpercaya seperti U.S Department State, U.N, United in Indonesia, foreign Assistance, dan sebagainya. Selain itu penelitian ini juga memanfaatkan beberapa portal berita Internasional seperti CNN, BBC, The Diplomat, The Guardian, Foreign Affair, The New York Times, United Nations dan lainnya

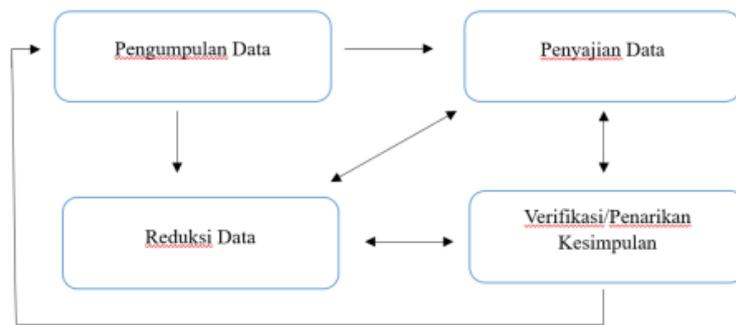
1.8.5 Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, penulis akan mengolah dan menyusun data yang telah didapatkan dengan sedemikian rupa agar kemudian diatur berdasarkan pola, kategori dan satuan uraian. Sehingga penulis bisa melakukan identifikasi hipotesis yang kemudian dapat diuraikan melalui data.³⁰

²⁹ Yesi Olivia. “Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional”. 2013. Transnasional: Ilmu Hubungan Internasional.

³⁰ Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi” (2007).

Miles dan Hubberman berpendapat bahwa Teknik analisis data terdiri atas tiga langkah dalam waktu yang bersamaan. Yaitu reduksi data (*data reduction*) penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).³¹ Penjabaran dari teknik analisis data yang digunakan yaitu :



GAMBAR 1 PROSES ANALISIS DATA PENULISAN KUALITATIF

Sumber: Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, “Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook.

1.8.5.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang berhubungan dengan pengorganisasian, sentralisasi dan penyederhanaan, penggalian dan transformasi data yang terkandung dalam catatan lapangan dan transkrip. Dalam penyajian data, kegiatan yang dilakukan berupa penyajian informasi secara lebih terorganisir dan ringkas sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dan memikirkan tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan Langkah reduksi atau penyederhanaan data dilakukan dengan membagi data menjadi beberapa bagian *keywords* dan kategori yang masih berkaitan erat dengan penelitian seperti pertahanan militer, hak veto, kebijakan luar negeri.

³¹ Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (sage, 1994).

1.8.5.2 Penyajian Data

Penyajian data dikaitkan dengan kerangka konseptual yang digunakan penulis untuk memvisualisasikan suatu fenomena. Data sering dianalisis dan diteliti menurut teori yang dipilih penulis dan akan disajikan berdasarkan teori yang digunakan sebelumnya. Saat menyajikan data, penulis memilih untuk menghubungkan dalam hak veto AS dalam sidang keamanan PBB melalui konsep *national interest*.

1.8.5.3 Penarikan Kesimpulan Serta Melakukan Pengecekan Validitas Data.

Tahap ini tergolong tahap terakhir karena dilakukan selama proses evaluasi penelitian serta analisis hasil dari penelitian yang ditemukan.³² Dalam tahapan terakhir atau penarikan kesimpulan, penulis melakukan hubungan kembali mengenai kepentingan apa dan bagaimana AS mengeluarkan kebijakan hak veto dalam sidang keamanan PBB.

³² Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook..*

1.9. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

Merupakan bab pertama dalam penelitian ini yang berisi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penulisan, manfaat penulisan, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Bab ini membahas secara mendalam kebijakan luar negeri AS sebagai salah satu aspek penting dalam dinamika politik global. Kebijakan luar negeri AS, yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik dan Internasional, telah menjadi acuan penggerak untuk dalam membentuk tatanan dunia modern dan juga bagaimana kebijakan AS di timur tengah serta kepentingan AS dalam konflik Israel-Palestina.

BAB III Peran Amerika Serikat di PBB

Bab ini secara khusus membahas bagaimana peran AS di PBB untuk menangani permasalahan masalah internasional. Peran AS di PBB mempunyai misi untuk pemeliharaan perdamaian, menghentikan pelanggaran HAM, dan bantuan untuk negara berkembang dalam kualitas hidup masyarakat. Pada bab ini juga membahas sejarah keterlibatan AS di PBB, peran AS konflik

Israel-Palestina, dan penggunaan veto oleh AS dalam konflik Israel-Palestina.

BAB IV Analisis Kepentingan Nasional Amerika Serikat Melalui Kebijakan Veto Dalam Sidang Keamanan PBB

Bab ini berisi analisis terkait bagaimana hubungan negara AS dan Israel melalui veto AS mendapatkan keuntungan negara AS dalam memenuhi pencapaian kepentingan. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan teori dari Shaohua Hu mengenai penggunaan hak veto AS di sidang keamanan PBB terkait konflik Israel-Palestina bagian dari kepentingan nasional AS

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas penulisan yang telah dilakukan yang menjawab pertanyaan penulisan atas penggunaan hak veto AS di sidang keamanan PBB terkait konflik Israel-Palestina bagian dari kepentingan nasional AS.

